BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan suaka politik Internasional diatur dalam Instrumen hukum internasional, diantaranya Kovensi tentang pengungsi 1951, Kovensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik, Kovensi Caracas 1954 tentang Suaka Teritorial dan yang tidak bersifat yuridis, Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, Declarations on Teritorial Asylum.
2. Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi 1951, tetapi Indonesia memiliki kerangka hukum yang berupaya memberikan perlindungan bagi pencari suaka melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Dalam penanganan kasus 22 orang pengungsi asal Aghanistan dan Somalia pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 untuk menampung pengungsi Afghanistan dan Somalia, hingga diperoleh kepastian Status mereka di negara ketiga. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia berfungsi sebagai tempat singgah sementara bagi para pencari suaka sebelum mereka mendapatkan pemukiman kembali "*resettlement*" di negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Proses ini sepenuhnya difasilitasi oleh UNHCR, yang bertanggung jawab dalam menentukan status pengungsi, memberikan bantuan kemanusiaan, serta mengupayakan solusi bagi mereka, baik melalui pemindahan ke negara ketiga, atau repatriasi sukarela.

B. SARAN

1. Pengaturan terhadap pemberian suaka politik dalam hukum internasional perlu diperkuat dengan kerangka yang lebih jelas dan universal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pencari suaka politik dilindungi secara efektif, dan memperkuat kerja sama internasional. Negara-negara perlu menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur masalah suaka, seperti prinsip *non-refoulement*, meskipun belum meratifikasi instrumen hukum internasional terkait.
2. Dalam mengimplementasikan pemberian suaka politik di Indonesia perlunya mempertimbangkan untuk meratifikasi instrumen internasional terkait Kovensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan memperkuat kerangka hukum nasional. Hukum nasional Indonesia perlu mengatur lebih jelas tentang perlindungan dalam pemberian suaka politik kepada orang asing.